

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Suriah merupakan negara yang damai, sekuler dan stabil secara ekonomi tetapi setelah dimulainya perang saudara, negara yang indah ini semakin hancur. Setengah dari populasi telah mengungsi, hampir seperlima pengungsi berada di luar negeri, diperkirakan lebih dari satu juta orang Suriah telah tewas, dan lebih dari separuh penduduk sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Konflik ini merupakan bentuk penyiksaan berkepanjangan terhadap masyarakat Suriah yang menjadi tugas komunitas internasional untuk menemukan penyelesaiannya segera. Seiring berkembangnya konflik maka permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit dengan banyaknya aktor asing yang mengintervensi. Mulai dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran hingga kelompok teroris seperti Front Al Nusra dan Daesh.

PBB melalui Dewan Keamanan telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan perdamaian di Suriah. Upaya ini dilakukan melalui dikeluarkannya berbagai resolusi sepanjang tahun 2015-2018. Jumlah resolusi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2015-2018 adalah sebanyak 15 resolusi. Melalui resolusi – resolusi tersebut Dewan Keamanan berusaha menangani beberapa isu strategis yang dianggap cukup penting untuk segera ditangani. Beberapa isu ini adalah terorisme, penggunaan senjata kimia, korban jiwa masyarakat sipil, akses bantuan kemanusiaan, dan evakuasi warga sipil dari Suriah.

Resolusi ini beberapa diantaranya adalah pada Desember 2015, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2254, untuk mengesahkan rancangan bagi proses perdamaian di Suriah, menetapkan jadwal untuk diskusi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Kemudian pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2328, yang menuntut akses segera tanpa hambatan untuk pengamatan pemantauan evakuasi warga sipil dari Aleppo, Suriah. Dan 21 Desember

Ananta Florian, 2021

UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK SURIAH 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2016, memperbarui otorisasi untuk pengiriman bantuan lintas batas di Suriah hingga 10 Januari 2018, berdasarkan Resolusi 2332.

Dalam hal pemberantasan terorisme Dewan Keamanan mendapatkan keberhasilan dengan bantuan dari pasukan SDF yang didukung oleh aliansi. Namun terkait penggunaan senjata kimia tidak didapati keberhasilan. Hal ini dikarenakan kurang efektivitasnya kekuatan mengikat Dewan Keamanan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengguna senjata kimia meskipun sudah dilarang oleh OPCW. Terbukti dengan masih adanya penggunaan senjata kimia pada tahun 2018 di Suriah. Adanya resolusi 2254, 2268, 2401, dan 2449 terbukti efektif mengurangi angka korban jiwa masyarakat sipil. Resolusi-resolusi ini menuntut diadakannya gencatan senjata di Suriah. Resolusi – resolusi ini berpengaruh terhadap penurunan angka korban jiwa masyarakat sipil yang dibuktikan dengan data penurunan jumlah angka korban jiwa dari 2015-2018.

Terkait akses bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil juga berjalan dengan cukup baik. PBB dibantu dengan berbagai agensi kemanusiaan seperti WHO, ICRC, dan SARC dalam pemberian akses bantuan dan evakuasi warga sipil. PBB melalui resolusi Dewan Keamanan memberikan otoritas agar dapat diberikannya akses bantuan dan dibukanya perbatasan di Suriah. Meskipun proses ini telah terlaksana dengan baik akan tetapi muncul permasalahan baru dengan adanya penyerangan fasilitas medis yang terjadi. Selain itu juga muncul arus pengungsi yang tinggi dari Suriah sehingga membuat negara-negara tetangga harus kesulitan menghadapi lonjakan pengungsi tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini sejalan dengan agenda resolusi konflik yang dijelaskan oleh Miall. Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan merupakan salah satu proses resolusi konflik yaitu proses *peacemaking*. Dalam agenda *peacemaking* ini terdapat 3 proses yaitu koersi, litigasi, dan non-litigasi yang mana dicakup oleh resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan. Selain itu juga peran Dewan Keamanan sebagai organisasi internasional adalah sebagai arena politik dan instrument politik. Akan tetapi Dewan Keamanan PBB memiliki kelemahan yaitu tidak

Ananta Florian, 2021

UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK SURIAH 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dapat dikatakan aktor independen dikarenakan masih dipengaruhi oleh keputusan negara anggota. Adanya hak veto yang dimiliki anggota tetap juga menjadi faktor yang membuat Dewan Keamanan tidak dapat dikatakan aktor independen.

Maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah menjalani upaya-upaya penciptaan perdamaian yang sesuai dengan agenda *peacemaking* resolusi konflik. Dewan Keamanan juga telah melaksanakan tugasnya sebagai organisasi internasional. Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat hambatan yang didasari adanya kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat serta kurang efektifnya kekuatan mengikat dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Selain itu keberadaan negara yang memiliki hak eksklusif juga membuat upaya Dewan Keamanan kurang efektif karna harus selalu sejalan dengan kepentingan yang dibawa negara anggota tetap.

6.2 Saran

Saran untuk Dewan Keamanan PBB sebagai aktor non-negara adalah untuk lebih memperkuat mekanisme sanksi dan mengikat dari resolusi yang dikeluarkan. Dalam mengesahkan resolusi Dewan Keamanan harus menyelaraskan resolusi tersebut dengan kepentingan mayoritas komunitas internasional dan tidak hanya segelintir negara anggota tetap. Hak veto merupakan instrument yang dapat disalahgunakan apabila mekanisme penggunaannya tidak direvisi secara segera. Adanya hak veto membuat adanya disparitas kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan yang membuat konflik terus stagnan. Selain itu, Dewan Keamanan juga perlu memperhatikan mekanisme sanksi yang diberikan dimana harus adanya unsur koersif sehingga meminimalisir adanya kelalaian yang dilakukan oleh negara anggota terhadap implementasi suatu resolusi. Maka dari itu perlu adanya restrukturisasi dari segi mekanisme dan fungsi Dewan Keamanan terkait pengambilan dan implementasi resolusi agar tidak terjadi kasus seperti konflik Suriah lagi di masa yang akan datang.